

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PENGARUH JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Studi Kasus Pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Albertus Erwin Yuwanto

NIM : 072114047

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PENGARUH JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Studi Kasus Pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Albertus Erwin Yuwanto

NIM : 072114047

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2011

SKRIPSI

**PENGARUH JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Studi Kasus Pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Oleh:

Albertus Erwin Yuwanto

NIM : 072114047

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing



A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA

Tanggal: 5 Agustus 2011

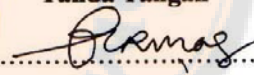
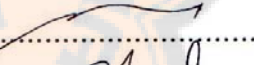
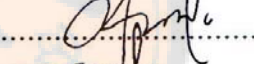
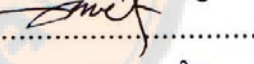
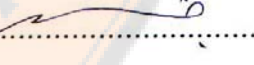
SKRIPSI

**PENGARUH JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**
Studi Kasus Pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Albertus Erwin Yuwanto
NIM : 072114047


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 18 Agustus 2011
Dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA.	
Sekretaris	: Josephine Wuri, S.E., M.Si.	
Anggota	: A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA.	
Anggota	: Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA.	
Anggota	: Josephine Wuri, S.E., M.Si.	

Yogyakarta, 26 Agustus 2011
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala sesuatu bila dilakukan dengan tulus dan ikhlas, maka hasil yang didapat akan menjadikan sesuatu itu istimewa pula.”

“Saat perasaan dihindangi kegelisahan dan kekhawatiran, yakinlah bahwa Tuhan akan selalu ada untuk mengulurkan tanganNya bagi kita.”

Seandainya layak dan berkenan, skripsi ini kupersembahkan

kepada:

- **Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria**
- **Bapak T. Suwandiyono beserta Ibu C. S. Rahayu**
- **Mba Ika , Mas Wiwit , Mas Tedy , Darian**
- **Sahabat dan teman-teman**



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **PENGARUH JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR** dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 18 Agustus 2010 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 26 Agustus 2011
Yang membuat pernyataan,

Albertus Erwin Yuwanto

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Albertus Erwin Yuwanto

Nomor Mahasiswa : 072114047

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya berjudul

**PENGARUH JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 26 Agustus 2011

Yang menyatakan,



(Albertus Erwin Yuwanto)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.”

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan, perhatian, ide, gagasan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J, selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Antonius Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi masukan, saran, semangat dan bimbingan kepada penulis selama *study* dan khususnya selama proses penyusunan skripsi.
5. J. Surat Djumadal, selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang telah memberikan ijin penelitian di Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Bp. Setiawan, Bp. Edi dan Bp. Nugri yang telah berkenan membantu dan memberikan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Akuntansi serta karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberi bimbingan dan bantuan selama *study* di Universitas sanata Dharma.
8. Bapak T. Suwandiyono beserta Ibu C. S. Rahayu yang selalu memberikan kenyamanan, perhatian, kekuatan, semangat, motivasi, doa dan cinta kasihnya.
9. Mba Ika, Mas Wiwit, Mas Tedy dan Darian yang selalu memberikan kegembiraan dan suka cita selama ini.
10. Keluarga besar Harjo Suhadi dan keluarga besar Dibyo Mulyono yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
11. Sahabat terbaikku Gita, Andri, Nanda, Jojo, Oca yang telah banyak membantu, setia menemani dan perhatian selama ini.
12. Anak-anak kontrakan Monjali, Ipenx, Gendut, Igen, Suneo atas tumpangannya selama ini.
13. Mas Ari, Claudia'06, Cery, Stefie, Furi, Novi, Mela dan Monik yang telah mengajarku dan menjelaskan semuanya.
14. Teman-teman kelas MPT dan akuntansi angkatan 2007, makasih untuk saran dan masukannya.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu dibenahi dan dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

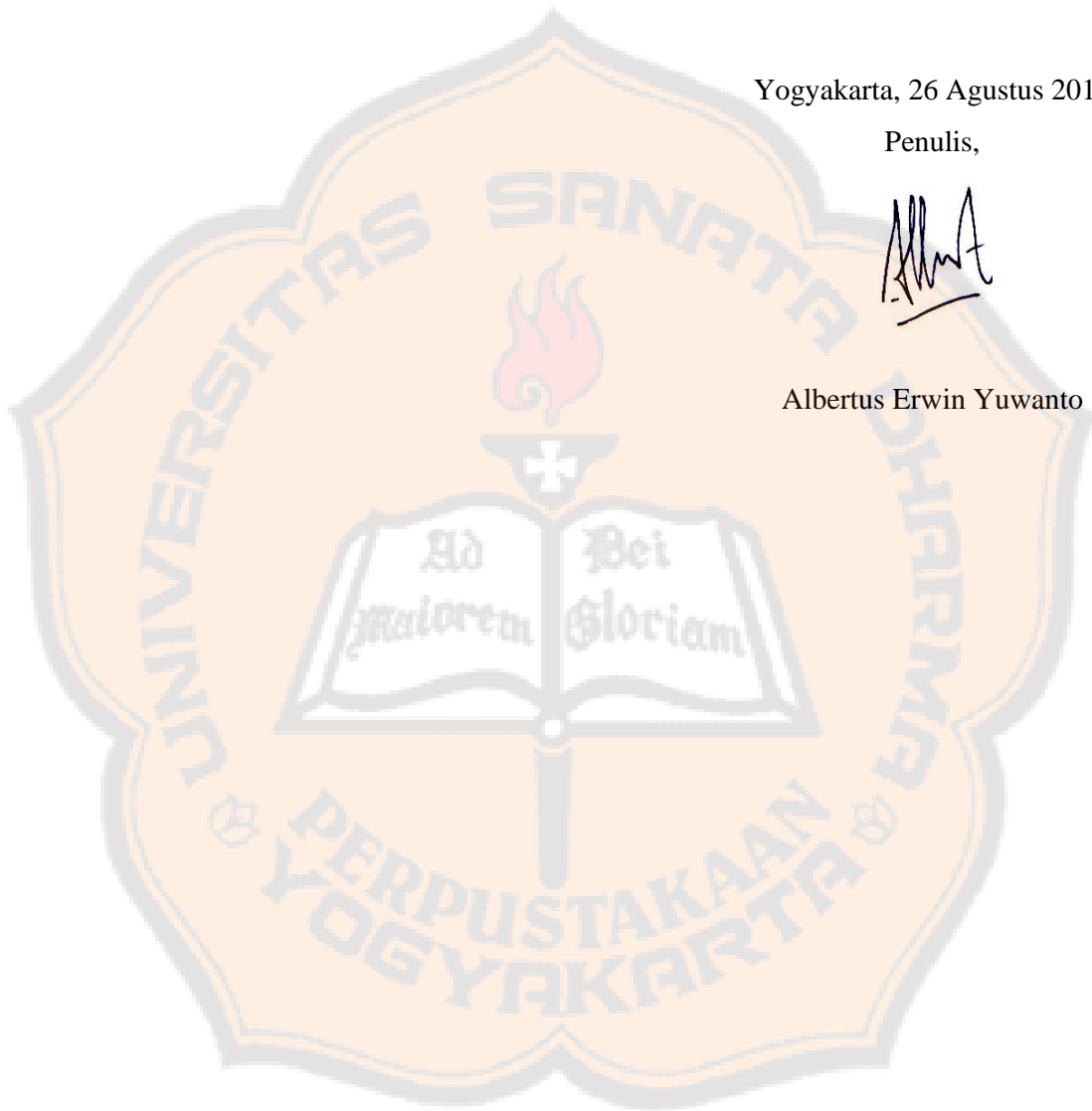
sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata penulis berharap semoga karya ini dapat member manfaat bagi semua pihak yang telah membutuhkan.

Yogyakarta, 26 Agustus 2011

Penulis,



Albertus Erwin Yuwanto



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6

BAB II	LANDASAN TEORI	8
A.	Pendapatan Daerah	8
1.	Pengertian Pendapatan Daerah	8
2.	Sumber-sumber Pendapatan Daerah	8
B.	Pendapatan Asli Daerah	9
1.	Pengertian Pendapatan Asli Daerah	9
2.	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	9
3.	Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah	9
C.	Pajak	10
1.	Pengertian Pajak	10
2.	Unsur-unsur Pajak	11
3.	Fungsi Pajak	12
4.	Jenis-jenis Pajak	12
5.	Pembagian Hukum Pajak	14
6.	Syarat Pemungutan Pajak	15
7.	Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	15
8.	Tata Cara Pemungutan Pajak	16
10.	Berakhirnya Utang Pajak	19
11.	Tarif Pajak	20
D.	Pajak Kendaraan Bermotor	20
1.	Pengertian Kendaraan Bermotor	20
2.	Pengertian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	21
3.	Jenis Pajak yang Dapat Dikenakan Terhadap Kendaraan Bermotor	21

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	21
5. Teori Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	22
6. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	22
7. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	23
8. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	23
9. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	24
10. Masa Pajak Kendaraan Bermotor	24
11. Saat Pajak Kendaraan Bermotor Terutang	24
12. Pengecualian dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor	24
E. Jumlah Kendaraan Bermotor	25
F. Hasil Penelitian Terdahulu	26
G. Hipotesis	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian	29
1. Tempat Penelitian	29
2. Waktu Penelitian	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
1. Subjek Penelitian	29
2. Objek Penelitian	30
D. Data yang Dibutuhkan	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Wawancara	30
2. Dokumentasi	31

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Kepustakaan	31
F. Variabel Penelitian	31
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM	39
A. Sejarah Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	39
B. Keadaan Geografis	42
C. Kekayaan Alam	43
D. Nilai-nilai Budaya	45
E. Ekonomi	47
F. Politik	50
G. Pendapatan Asli Daerah	53
H. Keadaan Jumlah Kendaraan Bermotor	54
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi Data	55
B. Analisis Data	57
C. Pembahasan	67
BAB VI PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Keterbatasan Penelitian	70
C. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Jumlah Kendaraan Bermotor Propinsi DIY pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010	54
Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Propinsi DIY Tahun 2005 s/d 2010	55
Tabel 3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi DIY Tahun 2005 s/d 2010	56
Tabel 4. Jumlah Kendaraan Bermotor Propinsi DIY Tahun 2005 s/d 2010 .	57



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I. Daerah keputusan penolakan variabel jumlah Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	35
Gambar II. Daerah keputusan penolakan variabel penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah	38
Gambar III. Grafik Histogram 1	59
Gambar IV. Grafik Normal Plots 1	60
Gambar V. Daerah penolakan variabel jumlah kendaraan bermotor	61
Gambar VI. Grafik Histogram 2	63
Gambar VII. Grafik Normal Plots 2	63
Gambar VIII. Daerah penolakan variabel penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	65

ABSTRAK

**PENGARUH JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Studi Kasus Pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Albertus Erwin Yuwanto
NIM : 072114047
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011**

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan (2) mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana dan untuk uji signifikansi menggunakan statistik uji t.

Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: (1) jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta (2) penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

ABSTRACT

**THE INFLUENCE OF MOTOR VEHICLE QUANTITY
ON MOTOR VEHICLE TAX INCOME
A Case Study at Daerah Istimewa Yogyakarta Province Government**

**Albertus Erwin Yuwanto
NIM : 072114047
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011**

The aims of this research were (1) to know the influence of motor vehicle quantity on the motor vehicle tax income in the Daerah Istimewa Yogyakarta Province region and (2) to know the influence of motor vehicle tax income on the regional original revenue in Daerah Istimewa Yogyakarta Province.

The kind of research was case study at Daerah Istimewa Yogyakarta Province Government. The techniques of collecting data used interview, documentation and literature review. The technique of data analysis used simple regression and for significance test it was used statistic of t test.

Based on the result of research, the researcher concluded that (1) the motor vehicle quantity had significant positive influence on motor vehicle tax income in Daerah Istimewa Yogyakarta Province region and (2) the motor vehicle tax income had significant positive influence on the regional original revenue in Daerah Istimewa Yogyakarta Province.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini, kegiatan pembangunan dan pengembangan pada pemerintah pusat tentunya sangat dibutuhkan demi kemajuan pemerintahan tersebut. Tidak hanya pemerintah pusat saja yang perlu melakukan pembangunan dan pengembangan itu, namun pemerintah daerah juga perlu melakukannya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000, pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam menyelenggarakan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Samudra, 1995: 38). Dengan demikian, pemerintah daerah berkewajiban dalam menyejahterakan dan melayani masyarakatnya dengan adil dan bijaksana. Kewajiban tersebut dapat terwujud apabila pemerintah daerah mampu memanfaatkan potensi atau sumber daya–sumber daya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya lain yang dimiliki.

Sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pengembangan salah satunya adalah penghasilan dari daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari berbagai sumber. Beberapa sumber Pendapatan Asli

Daerah adalah penerimaan dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah (Samudra, 1995: 51).

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan sumbangan paling besar adalah pendapatan yang berasal dari pemungutan pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 2 Th 2002). Pajak daerah tersebut kemudian akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang sudah atau yang akan dilakukan. Dengan demikian, pemerintah daerah akan berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun, pemerintah daerah juga harus memperhatikan pelayanan pajak yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat merupakan kunci utama dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu dari sekian banyak bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirasa mempunyai andil yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor juga berkaitan dengan jumlah kendaraan bermotor yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semenjak adanya kebijakan pemerintah mengenai penghapusan sanksi administrasi dan pokok pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau sering disebut dengan pemutihan pada tahun 2007 dan 2010, jumlah kendaraan bermotor yang masuk dan beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi semakin bertambah. Kendaraan bermotor tersebut terdiri dari berbagai macam jenis, tahun pembuatan dan kondisi dari masing-masing kendaraan. Namun, penambahan jumlah kendaraan bermotor tersebut belum tentu menambah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara signifikan.

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap yang dikenal dengan sebutan SAMSAT. Pembayaran oleh wajib Pajak Kendaraan Bermotor ini dilakukan ke Kantor Cabang Kas Daerah di SAMSAT, dimana pada umumnya kantor cabang ini berada di setiap Daerah Kabupaten dan Kota diseluruh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem pengelolaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini sepenuhnya dilakukan di setiap Kantor Cabang Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasar pada uraian di atas, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh dari berbagai sumber. Salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang juga berkaitan dengan jumlah kendaraan bermotor. Untuk itu, penulis ingin mengetahui apakah jumlah kendaraan bermotor

berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan penulis adalah :

1. Apakah jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Batasan Masalah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dibagi menjadi Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. Ada berbagai macam komponen pajak yang menjadi hak Pemerintah Daerah Tingkat I (propinsi) yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, seperti: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membatasi masalah pada Pajak Kendaraan Bermotor sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah dan jumlah kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dalam penentuan kebijakan yang akan diambil dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan kebijakan dalam menangani jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat.

2. Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan dan informasi serta wawasan dalam penelitian mahasiswa Universitas Sanata Dharma berikutnya khususnya dalam bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan jumlah kendaraan yang dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah.

3. Penulis

Penulis dapat semakin mengetahui kondisi atau kejadian nyata yang terjadi dalam suatu lembaga pemerintahan daerah serta sebagai pelatihan untuk semakin berkembang dan tentunya bisa menerapkan apa yang telah dipelajari selama studi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan penulis dalam menyusun penelitian ini, hasil penelitian terdahulu serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

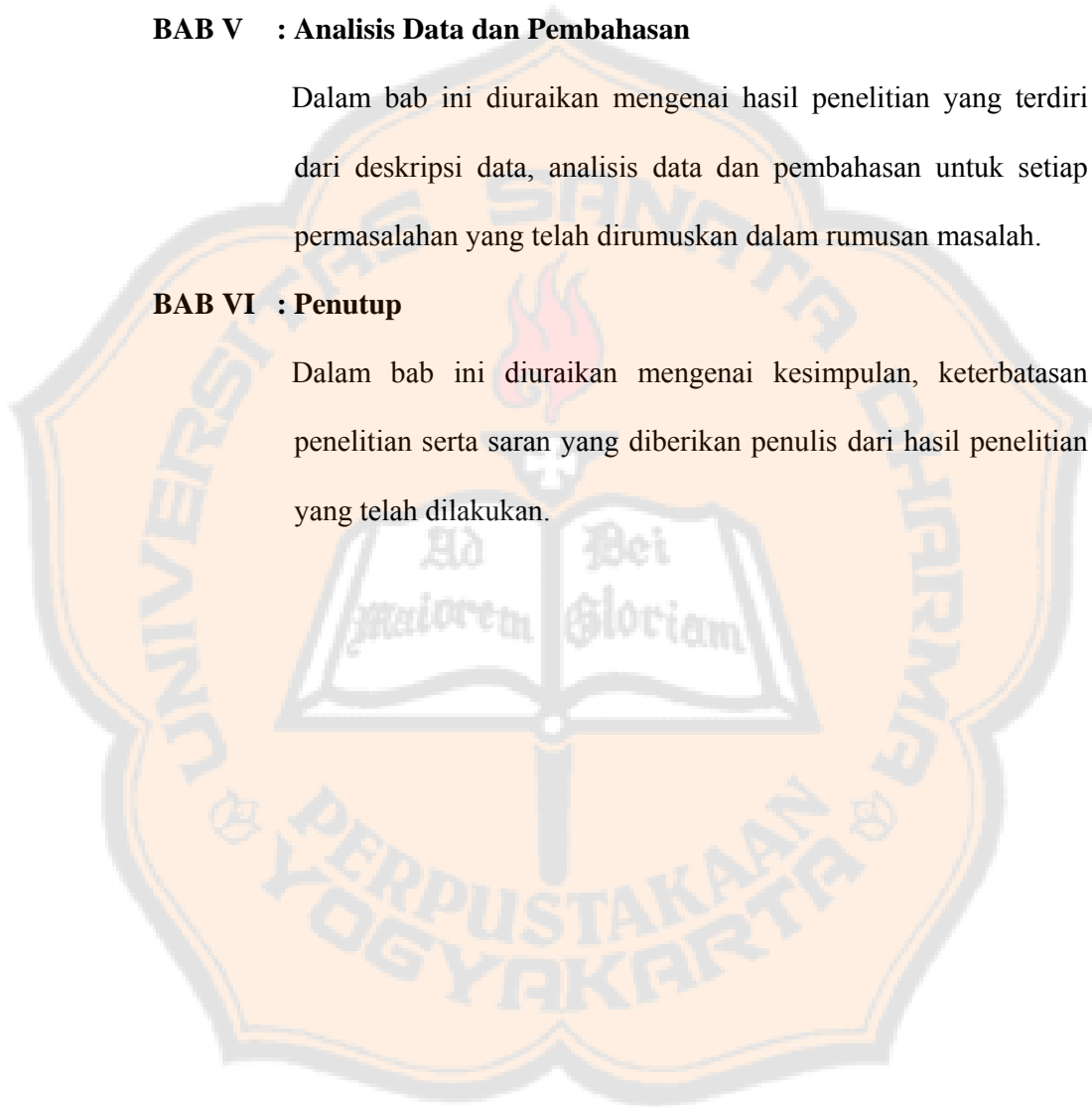
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V : Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data, analisis data dan pembahasan untuk setiap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB VI : Penutup

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran yang diberikan penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah sumber pendapatan yang tidak saja meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya (Samudra, 1995:50).

2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain Penerimaan yang sah

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah (Samudra 1995: 50).

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Bagian laba dari perusahaan milik daerah
- d. Penerimaan dari dinas-dinas
- e. Penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).

3. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000, jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Jenis pajak propinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
- b. Jenis pajak Kabupaten/ Kota
- 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 - 7) Pajak Parkir
- c. Retribusi Daerah
- 1) Retribusi Jasa Umum
 - 2) Retribusi Jasa Usaha
 - 3) Retribusi Perijinan Tertentu

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Para ahli mengungkapkan beberapa pengertian mengenai pajak, berikut ini tiga pengertian mengenai pajak (Resmi, 2003: 1), yaitu :

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH, yaitu :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Mr. Dr N. J. Feldmann, yaitu :

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengertian dari beberapa ahli tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban rakyat untuk menyerahkan sebagian dari kekayaannya menurut Undang-Undang yang berlaku yang sifatnya memaksa namun tidak ada jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2. Unsur-Unsur Pajak

Unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo dalam Tri (2007: 13), adalah sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang.
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak (Resmi, 2003: 2-3), yaitu :

a. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

4. Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga (Resmi, 2003: 6-8), yaitu :

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : pajak penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : pajak pertmbahan nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : pajak penghasilan.
- 2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak negara (Pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan.
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh pajak daerah tingkat I (Propinsi) : Pajak Kendaraan Bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama tanah, pajak izin penangkapan ikan di wilayahnya. Contoh pajak daerah tingkat II

(Kabupaten/Kotamadya) : pajak pembangunan I, pajak penerangan jalan, dan lain-lain.

5. Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak dibagi menjadi dua (Resmi, 2003: 4-5), yaitu :

a. Hukum Pajak Materiil

Membuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besarnya. Termasuk juga peraturan yang memuat kenaikan, denda, hukuman dan cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

b. Hukum Pajak Formil

Merupakan peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak materiil tersebut menjadi suatu kenyataan.

Hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai :

- 1) Penetapan suatu utang pajak
- 2) Kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya
- 3) Kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak)
- 4) Kewajiban pihak ketiga
- 5) Prosedur dalam pemungutannya

6. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam Purnandika (2005: 12) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

7. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak terhadap rakyatnya (Resmi, 2003: 5-6), adalah sebagai berikut :

- a. Teori Asuransi

Termasuk dalam tugas negara untuk melindungi rakyat dan segala kepentingannya: keselamatan dan keamanan jiwa dan juga harta bendanya.

- b. Teori Kepentingan

Teori ini semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

c. Teori Gaya Pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk itu, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*, yaitu karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak.

Oleh karena itu, setiap orang menginsyafi bahwa menjadi suatu kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

8. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari (Resmi, 2003: 8-11), sebagai berikut :

a. Stelsel Pajak

- 1) Stelsel nyata (riil), pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihannya adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahannya adalah semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.
- 2) Stelsel anggapan (fiktif), pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.
- 3) Stelsel campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal suatu tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut.

Sebaliknya, jika besarnya pajak lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, atas kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

b. Asas Pemungutan Pajak

- 1) Asas domisili (asas tempat tinggal), negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri.
- 2) Asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3) Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

- 1) *Official assesment system*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).
- 2) *Self assesment system*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan

undang-undang perpajakan yang berlaku (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

- 3) *With holding system*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

9. Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak akan berakhir atau hapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut (Resmi, 2003: 12-13) :

- a. Pembayaran/ Pelunasan, dapat dilakukan dengan pemotongan/ pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerima pajak.
- b. Kompensasi, dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran.
- c. Daluwarsa, telah lewat batas waktu tertentu berarti jika dalam waktu tertentu, suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka utang pajak tersebut dianggap telah lunas/ dihapus/ berakhir dan tidak dapat ditagih lagi.
- d. Pembebasan/ Penghapusan, kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan hapus oleh *fiskus* karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.

11. Tarif Pajak

Jenis-jenis tarif pajak dibedakan menjadi (Resmi, 2003: 13-15) :

- a. Tarif Tetap, adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.
- b. Tarif Proporsional (Sebanding), adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
- c. Tarif Progresif (Meningkat), adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
 - 1) Tarif progresif-proporsional
 - 2) Tarif progresif-progresif
 - 3) Tarif progresif-degresif
- d. Tarif Degresif (Menurun), adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

D. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no. 63 Tahun 2008 kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

2. Pengertian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Propinsi DIY no. 2 Tahun 2007, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penghimpunan data objek dan data subjek, sampai kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak serta penyetorannya. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

3. Jenis Pajak yang Dapat Dikenakan Terhadap Kendaraan Bermotor

Ada beberapa jenis pajak yang dapat dikenakan terhadap kendaraan bermotor (Samudra, 1995: 144-145), antara lain :

- a. *Motor Fuels Tax/ MFT* (pajak minyak atas kendaraan bermotor)
- b. *Motor Vehicle Licence Tax/ MVLT* (pajak lisensi atas kendaraan bermotor)
- c. *Licence Tax/ DLT* (pajak atas surat izin mengemudi)
- d. *Motor Vehicle Purchase Tax/ MVPT* (pajak pembelian atas kendaraan bermotor)

4. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah;

- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 35 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Teori Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak terhadap kendaraan bermotor dapat ditentukan sebagai berikut (Samudra, 1995: 145-146) :

- a. *Gross Weight/ Net Weight* (berat kotor atau berat bersih kendaraan bermotor)
- b. *Horse Power* (kekuatan mesin)
- c. *Ownership* (pemilikan)
- d. *Seat Capacity* (kapasitas tempat duduk)
- e. *Type* (jenis kendaraan)

6. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 2 Tahun 2007, subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

7. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Propinsi DIY no. 2 tahun 2007, objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

8. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Propinsi DIY no. 2 tahun 2007, perhitungan dasar pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dikali dengan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan :

- a. Isi silinder dan/ atau satuan daya
- b. Jenis, merk, dan tahun pembuatan kendaraan bermotor
- c. Negara asal kendaraan bermotor
- d. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Bobot yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Tekanan gandar
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

9. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Gubernur DIY No. 35 tahun 2005 adalah sebagai berikut :

- a. 1 % untuk kendaraan umum/ plat kuning
- b. 1,5 % untuk sepeda motor
- c. 0,5 % untuk alat-alat berat dan alat-alat besar
- d. 1,5 % untuk kendaraan bukan umum

10. Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Propinsi DIY no. 2 tahun 2007, masa Pajak Kendaraan Bermotor adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

11. Saat Pajak Kendaraan Bermotor Terutang

Menurut Peraturan Daerah Propinsi DIY no. 2 tahun 2007, Pajak Kendaraan Bermotor terutang sejak tidak dibayarnya pajak.

12. Pengecualian dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934, pajak tidak dipungut terhadap kendaraan sebagai berikut (Samudra, 1995: 155) :

- a. Kendaraan bermotor milik negara atau daerah, yang hanya digunakan untuk dinas umum
- b. Kendaraan bermotor yang menurut peraturan ordonansi lalu-lintas diizinkan berjalan dengan nomor percobaan (*test number*)

- c. Kendaraan bermotor yang menurut sifatnya hanya digunakan untuk pembikinan dan pemeliharaan jalan-jalan
- d. Pemadam kebakaran (*fire engines*)
- e. Kendaraan bermotor para konsul dan wakil negara asing
- f. Kendaraan bermotor turis yang tidak lebih lama dari 90 hari

E. Jumlah Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Salah satu peningkatan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor di pengaruhi oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beredar. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan ini dapat dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang potensial.

Dalam salah satu artikel di koran Kompas (26 Mei 2010 dan 12 Agustus 2010) menyebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini telah mendekati pada titik kemacetan. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah kendaraan yang beredar ini mencapai 2 juta unit, 90

persennya adalah kendaraan beroda dua dan 20 persennya berasal dari luar Yogyakarta yang kebanyakan adalah milik mahasiswa. Ini mungkin akan semakin bertambah dengan banyaknya pendatang khususnya mahasiswa yang kuliah di Yogyakarta.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah kemajuan teknologi. Hal ini terlihat dari kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam hal inovasi dan kecanggihan dari kendaraan bermotor tersebut. Kemudahan dalam mendapatkan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun juga mengalami kemudahan, misalnya dapat membeli secara kredit dengan bunga yang terjangkau serta penawaran-penawaran yang menarik lainnya yang ditawarkan kepada calon pembeli. Dengan semakin banyaknya pemakai kendaraan bermotor, maka semakin banyak pula wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat mendukung program pemerintah daerah dalam hal peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Handaru Purnandika (2005) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 1998 – 2003”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor periode tahun 1998 – 2003 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi DIY periode tahun 1998 – 2003.

Cornelius Tri Yudiyanto (2007) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Tunggakan Pajak dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 1996/ 1997 - 2005”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor periode tahun 1996/ 1997 – 2005 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi DIY periode tahun 1996/ 1997 – 2005. Sedangkan tunggakan pajak dan jumlah kendaraan bermotor periode tahun 1996/ 1997 – 2005 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi DIY periode tahun 1996/ 1997 – 2005. Apabila secara bersama-sama (simultan) Pajak Kendaraan Bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, tunggakan pajak dan jumlah kendaraan bermotor periode tahun 1996/ 1997 – 2005 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi DIY periode tahun 1996/ 1997 – 2005.

G. Hipotesis

Jumlah kendaraan bermotor seharusnya memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Bentuk pengaruh tersebut apabila jumlah kendaraan bermotor meningkat maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga meningkat dan begitu pula sebaliknya.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini, penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor seharusnya memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Bentuk pengaruh tersebut apabila penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga meningkat dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang peneliti rumuskan adalah :

H_1 = jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

H_2 = penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami suatu hal serta dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus, tidak dapat dibuat rampadan atau generalisasi (Sulistyo Basuki, 2006: 113). Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2011 sampai Mei 2011.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, jumlah kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah.

D. Data yang Dibutuhkan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah kendaraan bermotor tahun 2005 – 2010 pada Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman serta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2005 – 2010 pada Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman serta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2005 – 2010.
4. Gambaran umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data-data atau laporan realisasi yang berhubungan dengan penerimaan

Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, jumlah kendaraan bermotor dan gambaran umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data atau catatan tertulis yang relevan dan akurat. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau laporan realisasi mengenai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, jumlah kendaraan bermotor dan gambaran umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kepustakaan

Merupakan data sekunder dalam mencari sumber penelitian, literatur-literatur, buku-buku, ataupun dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian.

F. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 yaitu :

1. Jumlah Kendaraan Bermotor

Variabel jumlah kendaraan bermotor meliputi semua kendaraan umum/ plat kuning, sepeda motor, alat-alat berat dan alat besar, dan kendaraan bukan umum yang berada di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman serta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor meliputi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari semua kendaraan umum/ plat kuning, sepeda motor, alat-alat berat dan alat besar, dan kendaraan bukan umum yang berasal dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman serta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pendapatan Asli Daerah

Variabel Pendapatan Asli Daerah meliputi seluruh pendapatan yang diterima oleh pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Pertama

Untuk menjawab permasalahan pertama yaitu mengenai apakah jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan beberapa langkah, sebagai berikut :

a. Menguji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2009: 147), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada uji t dan F mengasumsikan

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Menentukan persamaan regresi sederhana

Untuk mengetahui pengaruh dari jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor digunakan persamaan regresi sederhana. Dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistik Program For Social Science*) 16 for windows dalam menentukan persamaan regresinya.

1) Persamaan umum untuk regresi sederhana adalah :

$$Y' = a + bX$$

Keterangan :

Y' = penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

a = koefisien konstanta

b = koefisien regresi yang mengukur besarnya perubahan variabel dependen Y atau penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akibat perubahan variabel independen X atau jumlah kendaraan bermotor sebesar satu satuan

X = jumlah kendaraan bermotor

2) Menguji hipotesis

a) Menentukan formulasi hipotesa

H_0 : $b = 0$, berarti jumlah kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

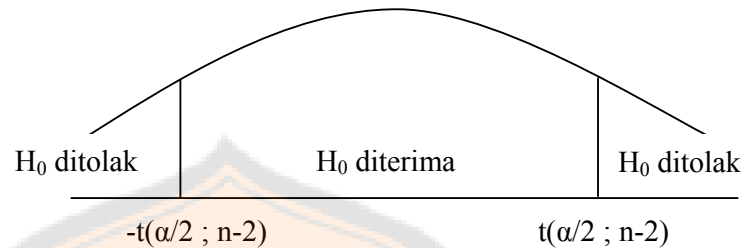
H_1 : $b \neq 0$, berarti jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

b) Menentukan tingkat signifikansi dan t_{hitung}

Dalam penelitian ini digunakan α sebesar 5% dengan nilai *level of signifikan* sebesar 95% dan *degree of freedom* ($n-2$).

2). Nilai t_{hitung} diperoleh dengan bantuan program *SPSS (Statistik Program For Social Science) 16 for windows*.

c) Menentukan daerah keputusan



Gambar I. Daerah keputusan penolakan variabel jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan PKB.

Keputusan yang diambil :

H_0 : diterima, $-t(\alpha/2; n-2) \leq t_{hit} \leq t(\alpha/2; n-2)$

H_0 : ditolak, $t_{hit} > t(\alpha/2; n-2)$ atau $t_{hit} < -t(\alpha/2; n-2)$

d) Menarik kesimpulan

(1) H_0 diterima, maka jumlah kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

(2) H_0 ditolak, maka jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Permasalahan Kedua

Untuk menjawab permasalahan kedua yaitu mengenai apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan beberapa langkah, sebagai berikut :

a. Menguji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2009: 147), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Menentukan persamaan regresi sederhana

Untuk mengetahui pengaruh dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan persamaan regresi sederhana. Dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistik Program For Social Science*) 16 for windows dalam menentukan persamaan regresinya.

1) Persamaan umum untuk regresi sederhana adalah :

$$Y' = a + bX$$

Keterangan :

Y' = Pendapatan Asli Daerah

a = koefisien konstanta

b = koefisien regresi yang mengukur besarnya perubahan variabel dependen Y atau Pendapatan Asli Daerah akibat perubahan variabel independen X atau penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar satu satuan

X = penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

2) Menguji hipotesis

a) Menentukan formulasi hipotesa

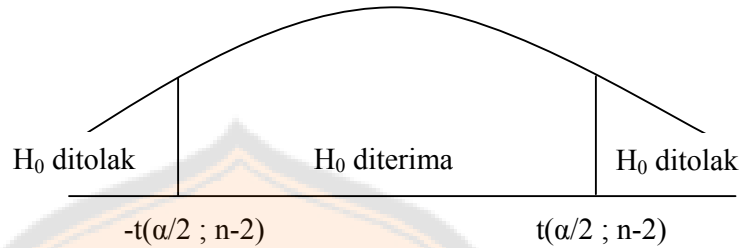
$H_0 : b = 0$, berarti penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_2 : b \neq 0$, berarti penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b) Menentukan tingkat signifikansi dan t_{hitung}

Dalam penelitian ini digunakan α sebesar 5% dengan nilai *level of signifikan* sebesar 95% dan *degree of freedom* ($n-2$). Nilai t_{hitung} diperoleh dengan bantuan program *SPSS (Statistik Program For Social Science) 16 for windows*.

c) Menentukan daerah keputusan



Gambar II. Daerah keputusan penolakan variabel penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD.

Keputusan yang diambil :

H_0 : diterima, $-t(\alpha/2; n-2) \leq t_{hit} \leq t(\alpha/2; n-2)$

H_0 : ditolak, $t_{hit} > t(\alpha/2; n-2)$ atau $t_{hit} < -t(\alpha/2; n-2)$

d) Menarik kesimpulan

(1) H_0 diterima, maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

(2) H_0 ditolak, maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat propinsi yang ada di Indonesia. Propinsi ini beribukota di Yogyakarta. Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau *Ngayogyakarta* (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan *Ngayogyakarta Hadiningrat* berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota *Sanskrit Ayodhya* dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa).

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda disebut

Zelfbesturende Landschappen. Di jaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I.

Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam *Staatsblad* 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 No. 577.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pegangan hukumnya adalah:

1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia.

2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah)
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat bersama dalam satu naskah).

Dari 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia, justru dimasa perjuangan bahkan mengalami saat-saat yang sangat mendebarkan, hampir-hampir saja Negara Republik Indonesia tamat riwayatnya. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang berkumpul dan berjuang di Yogyakarta mempunyai kenangan tersendiri tentang wilayah ini. Apalagi pemuda-pemudanya yang setelah perang selesai, melanjutkan studinya di Universitas Gajah Mada, sebuah Universitas Negeri yang pertama didirikan oleh Presiden Republik Indonesia, sekaligus menjadi monumen hidup untuk memperingati perjuangan Yogyakarta.

Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan

mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati.

Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman.

Sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata.

B. Keadaan Geografis

1. Geografi

Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah sebelah selatan, tepatnya berada pada posisi $70^{\circ} 33' \text{ LS} - 8^{\circ} 12' \text{ LS}$ dan $110^{\circ} 00' \text{ BT} - 110^{\circ} 50' \text{ BT}$.

2. Batas wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi oleh Samudera Hindia, sedangkan di bagian timur laut, barat laut dan bagian barat dibatasi oleh wilayah Propinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- a. Kabupaten Wonogiri di bagian Tenggara
- b. Kabupaten Klaten di bagian Timur Laut

- c. Kabupaten Magelang di bagian Barat Laut
 - d. Kabupaten Purworejo di bagian Barat.
3. Luas wilayah

Luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.185,80 km² yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu:

- a. Kota Yogyakarta seluas 32,50 km²
- b. Kabupaten Kulon Progo seluas 586,27 km²
- c. Kabupaten Bantul seluas 506,85 km²
- d. Kabupaten Gunung Kidul seluas 1.485,36 km²
- e. Kabupaten Sleman seluas 574,82 km².

C. Kekayaan Alam

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta relatif terbatas baik tanah, air, maupun kandungan mineral yang tersimpan didalam perut bumi. Meskipun demikian dengan keadaan alam yang terbatas, Daerah Istimewa Yogyakarta telah mampu mengembangkan sector-sektor ekonomi yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Kekayaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah jenis tanah *alluvial*, *litosol*, *regosol*, *rensina*, *grumosol*, *meditran* dan *latosol*. Tanah tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lahan pertanian, perikanan,

peternakan, pekarangan atau pembangunan dan lainnya. Untuk penguasaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dikategorikan menjadi dua, yaitu tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan tanah yang dikuasai negara. Selain lahan yang dimanfaatkan, masih terdapat 37.053,22 ha yang merupakan kawasan Hutan Negara. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah tanah yang telah diwarisi secara turun menurun, yang pada umumnya telah dimanfaatkan untuk lahan pemukiman, pertanian dan perkebunan. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh negara adalah tanah kawasan hutan yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, hutan konversi dan tanah-tanah umum, seperti tanah untuk saluran irigasi, jalan, lapangan olahraga, kuburan dan lain-lain.

2. Air

Kondisi sumber daya air di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi air hujan, air permukaan dan air tanah. Air permukaan dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan keperluan domestik. Sedangkan air tanah dimanfaatkan untuk rumah tangga, perkantoran, perhotelan, industri berat dan sebagainya. Menurut penelitian cadangan air permukaan volumenya mencapai 2.333.576,696 m³ dan telah dimanfaatkan sebesar 1.645.33,407 m³. Dan untuk cadangan air tanah yang terdiri dari cadangan air tanah bebas adalah 320.0 m³ dan telah dimanfaatkan 96.533,623 m³.

3. Flora dan Fauna

Ada beberapa jenis flora yang tumbuh di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kapuk, salak pondoh dan sebagainya. Di kawasan hutan ditemukan jenis kayu dadap, rotan, sawo kecil, kemiri, jati, pinus dan sebagainya. Terdapat pula beberapa jenis fauna yang hidup, antara lain hewan ternak seperti sapi, kerbau, domba dan unggas. Ada pula hewan yang hidup di kawasan hutan, seperti kera, kucing hutan dan berbagai jenis burung.

b. Bahan Tambang

Bahan tambang yang terdapat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya termasuk bahan galian golongan C, yang terdiri dari batu kapur, kalsit, kaolin, abu bumi/lempung sirap, gips, tias, batu apung, pasir kuarsa, batu beku andesit, tanah liat, pasir dan kerikil.

D. Nilai-Nilai Budaya

Yogyakarta terkenal sebagai kota Revolusi dan kebudayaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap daerah di sekitarnya. Kebudayaan-kebudayaan tersebut adalah :

1. Kesenian

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa banyak menghasilkan berbagai bentuk kesenian yang memberikan ciri kekhasannya, terutama tercermin dalam bidang seni tari, karawitan klasik,

wayang dan ketoprak. Beberapa bentuk seni tari diantaranya yaitu Tari Bedoyo, Tari Golek, Tari Serimpi dan sebagainya.

2. Pakaian adat

Dalam hal berpakaian adat masyarakat Yogyakarta membedakan antara kaum pria dan wanita. Pakaian adat kaum pria terdiri atas tutup kepala (blangkon), baju jas dengan leher tertutup dan keris yang diselipkan di pinggang. Ia juga mengenakan kain batik yang mempunyai motif yang sama dengan yang dipakai kaum wanita. Sedangkan pakaian wanitanya terdiri atas kebaya dan kain batik dengan rambut yang di sanggul dan diberi hiasan konde.

3. Senjata

Senjata tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keris dan tombak. Senjata-senjata tersebut dikenal dengan sebutan tosan aji, yang mana tosan berarti besi dan aji yang berarti dihormati karena bertuah, sehingga tosan aji berarti senjata yang dihormati karena bertuah.

4. Bangunan

Jenis bangunan tempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dalam empat macam bentuk yang dibedakan berdasarkan bentuk atapnya, yaitu:

- a. Penggape yang mempunyai atap satu sisi.
- b. Kampong yang mempunyai atap dua sisi.
- c. Limasan yang mempunyai atap empat sisi.

- d. Joglo yang mempunyai empat sisi seperti limasan, hanya bubungannya lebih tinggi.

E. Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengikuti skenario nasional, yaitu menuju keseimbangan antara industry dengan pertanian sambil mendorong sektor lain. Semakin berperannya sektor industry dalam menggerakkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru serta pertumbuhan pesat sektor jasa seperti pariwisata dan transportasi yang menjanjikan peluang perkembangan serentak sejumlah besar sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi yang ada yaitu:

1. Pertanian

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk dan sekaligus sebagai penampung mayoritas angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini dengan luas 3.185,80 km² atau 318.580 ha mempunyai areal pertanian seluas 253.387,80 ha. Sektor-sektor pertanian yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

2. Industri

Untuk menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi, di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa macam industri, yaitu:

- a. Industri tekstil pakaian dan kulit
 - b. Industri makanan dan minuman
 - c. Industri kertas, percetakan dan penerbitan
 - d. Industri barang galian bukan logam
 - e. Industri kayu dan barang-barang dari kayu
 - f. Industri barang logam, mesin dan perlengkapannya
 - g. Industri kimia dan barang-barang dari kimia
3. Pertambangan dan Bahan Galian

Komoditi utama bahan pertambangan dan galian adalah abu bumi, pasir kuarsa, klasit, batu kapur, pasir kerikil dan gips.

4. Perhubungan

Sarana perhubungan utama di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah perhubungan darat dan perhubungan udara. Berdasarkan status pengelolaan dinas perhubungan, jalan diwilayah ini dapat dibedakan atas jalan negara yaitu sepanjang 90,50 km, jalan propinsi 407,602 km, jalan kabupaten 3.210,54 km, jalan kota 223,6 km serta jalan desa atau lingkungan 6.871 km. untuk perhubungan udara dilayani melalui Bandar Udara Adi Sucipto yang terletak di Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk darat yaitu, kereta api dilayani melalui Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan, kendaraan umum selain kereta api dilayani melalui Terminal Giwangan dan Terminal bantuan Jombor.

5. Pariwisata

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota wisata. Jumlah objek wisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 85 tempat yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Objek wisata itu terdiri dari 64 objek wisata budaya dan 19 objek wisata alam, yang diantaranya yaitu Candi Prambanan, Keraton Yogyakarta, Pantai Parangtritis, pusat perbelanjaan Malioboro dan lain-lain.

6. Perdagangan

Sistem pengadaan dan penyaluran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang yang dikategorikan strategis merupakan prioritas utama kebijaksanaan pembangunan system perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Prioritas yang utama adalah mengupayakan sebanyak mungkin barang produksi dalam negeri untuk industry dan konsumsi local, contohnya yaitu beras, gula, tepung terigu, kedelai, sabun, minyak, pupuk dan seluruh komponen bahan bangunan. Untuk perdagangan luar negeri Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 42 buah komoditi perdagangan, serta 34 negara sasaran ekspor. Komoditi-komoditi tersebut diantaranya adalah tekstil, sarung tangan golf, pakaian jadi, kerajinan kulit, lampu pijar, kerajinan perak, vanili, mebel kayu dan kerajinan gerabah.

F. Politik

Dalam bidang politik, Yogyakarta terkenal karena telah melahirkan sejumlah tokoh politik nasional yang memainkan peran sentral dalam keseluruhan rangkaian kehidupan politik di Indonesia dan juga menjadi tempat lahir dan persemaian bagi tumbuhnya organisasi politik dan kemasyarakatan terkemuka, seperti Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi besar di Indonesia. Ada beberapa bagian dari politik, yaitu:

1. Kebijakan Dasar Politik

Kebijakan dasar bidang politik yang diterapkan oleh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kebijakan yang mengacu pada serangkaian perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 26 tahun 1959.
- b. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang No. 43 tahun 1999.
- c. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

- f. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah.
- g. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- h. Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- i. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah.

2. Pemerintahan

Perubahan kebijakan di bidang pemerintahan daerah dari keseimbangan antara asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi titik berat dekonsentrasi membawa akibat terhadap perubahan struktur organisasi yang mendasar di propinsi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, propinsi dalam menyelenggarakan kewenangan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi hanya sebatas pada ketugasan dan fungsi fasilitas, koordinasi dan regulasi, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada implementasi restrukturisasi dan eksistensi perangkat daerah yang ada.

Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di dalam Peraturan Pemerintah tersebut

jumlah dan besarnya kelembagaan perangkat daerah telah dibatasi secara limitatif, namun demikian untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan penataan kelembagaan belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2003.

3. Organisasi dan Administrasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, struktur organisasi dan administrasinya adalah:

- a. Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Pemerinta Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X.
- c. Dalam menjalankan tugasnya dan kewenangannya sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab pada DPRD propinsi.
- d. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga teknis lainnya.
- e. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- f. Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijaksanaan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelaksana lainnya.
- g. Dinas Daerah adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah.

G. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didapat dari beberapa sumber, yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah
2. Hasil Retribusi Daerah
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - c. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah
 - g. Retribusi Izin Trayek
 - h. Retribusi Dispensasi Kelebihan Muatan
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik daerah Lainnya yang Dipisahkan
 - a. Bank Pembangunan Daerah
 - b. Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA
 - c. Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - a. Penjualan Drum Kosong
 - b. Jasa Giro
 - c. Sumbangan Pihak Ketiga
 - d. Angsuran Rumah Dinas
 - e. Pendapatan Lain-lain

H. Keadaan Jumlah Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor yang berada di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengalami peningkatan. Data jumlah kendaraan bermotor tersebut tersaji dalam table 1 berikut ini.

Tabel 1. Data Jumlah Kendaraan Bermotor Propinsi DIY pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010.

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2005	785.914
2006	863.524
2007	921.904
2008	1.023.258
2009	1.059.296
2010	1.120.907

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Propinsi DIY.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti tidak dikenainya pajak bea balik nama kendaraan bermotor, semakin mudahnya proses pembelian kredit kendaraan bermotor dan lain-lain. Selain itu, peningkatan ini juga dapat mempengaruhi kondisi atau keadaan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada tata letak kota, yaitu jalan di Yogyakarta akan menjadi lebih padat sehingga akan menimbulkan kemacetan.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh yang signifikan dari jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan pengaruh yang signifikan dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Data yang diperoleh adalah selama kurun waktu 6 tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Data tersebut tersaji dalam tabel 2.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Propinsi DIY Tahun 2005 s/d 2010.

Tahun	Realisasi PAD
2005	401.912.337.894,18
2006	436.500.656.107,92
2007	480.181.759.199,50
2008	699.726.193.600,48
2009	650.559.469.694,35
2010	768.341.053.125,19

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Propinsi DIY.

2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Data yang diperoleh adalah selama kurun waktu 6 tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Data tersebut tersaji dalam tabel 3.

Tabel 3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi DIY Tahun 2005 s/d 2010.

Tahun	Wilayah	Realisasi PKB
2005	Kota Yogyakarta	45.044.171.805
	Kabupaten Bantul	27.587.244.650
	Kabupaten Kulon Progo	7.698.799.600
	Kabupaten Gunungkidul	8.878.048.650
	Kabupaten Sleman	60.083.564.200
	Jumlah	149.291.828.905
2006	Kota Yogyakarta	49.856.504.690
	Kabupaten Bantul	31.670.891.200
	Kabupaten Kulon Progo	9.046.205.150
	Kabupaten Gunungkidul	10.664.295.850
	Kabupaten Sleman	69.909.075.500
	Jumlah	171.146.972.390
2007	Kota Yogyakarta	56.348.806.670
	Kabupaten Bantul	38.427.445.100
	Kabupaten Kulon Progo	10.697.227.850
	Kabupaten Gunungkidul	12.814.200.000
	Kabupaten Sleman	81.371.361.650
	Jumlah	199.659.041.270
2008	Kota Yogyakarta	60.989.479.500
	Kabupaten Bantul	43.055.170.300
	Kabupaten Kulon Progo	12.282.400.850
	Kabupaten Gunungkidul	14.946.510.350
	Kabupaten Sleman	90.864.036.800
	Jumlah	222.137.597.800
2009	Kota Yogyakarta	68.889.389.345
	Kabupaten Bantul	50.496.938.050
	Kabupaten Kulon Progo	14.513.759.400
	Kabupaten Gunungkidul	17.592.657.700
	Kabupaten Sleman	106.785.669.800
	Jumlah	258.278.414.295
2010	Kota Yogyakarta	72.204.809.050
	Kabupaten Bantul	55.864.713.000
	Kabupaten Kulon Progo	16.355.890.550
	Kabupaten Gunungkidul	19.475.416.350
	Kabupaten Sleman	116.966.440.400
	Jumlah	280.867.269.350

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Propinsi DIY.

3. Jumlah Kendaraan Bermotor

Data yang diperoleh adalah selama kurun waktu 6 tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Data tersebut tersaji dalam tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Kendaraan Bermotor Propinsi DIY Tahun 2005 s/d 2010.

Tahun	Wilayah	Jumlah KBM
2005	Kota Yogyakarta	183.965
	Kabupaten Bantul	180.899
	Kabupaten Kulon Progo	55.006
	Kabupaten Gunungkidul	60.989
	Kabupaten Sleman	305.055
	Jumlah	785.914
2006	Kota Yogyakarta	200.693
	Kabupaten Bantul	195.930
	Kabupaten Kulon Progo	62.009
	Kabupaten Gunungkidul	70.006
	Kabupaten Sleman	334.886
	Jumlah	863.524
2007	Kota Yogyakarta	207.643
	Kabupaten Bantul	214.239
	Kabupaten Kulon Progo	66.525
	Kabupaten Gunungkidul	77.479
	Kabupaten Sleman	356.018
	Jumlah	921.904
2008	Kota Yogyakarta	239.941
	Kabupaten Bantul	234.361
	Kabupaten Kulon Progo	76.002
	Kabupaten Gunungkidul	91.125
	Kabupaten Sleman	381.829
	Jumlah	1.023.258
2009	Kota Yogyakarta	226.160
	Kabupaten Bantul	248.436
	Kabupaten Kulon Progo	80.823
	Kabupaten Gunungkidul	95.783
	Kabupaten Sleman	408.094
	Jumlah	1.059.296
2010	Kota Yogyakarta	233.664
	Kabupaten Bantul	256.533
	Kabupaten Kulon Progo	88.952
	Kabupaten Gunungkidul	103.580
	Kabupaten Sleman	438.178
	Jumlah	1.120.907

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk mencari pengaruh dari jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan menggunakan

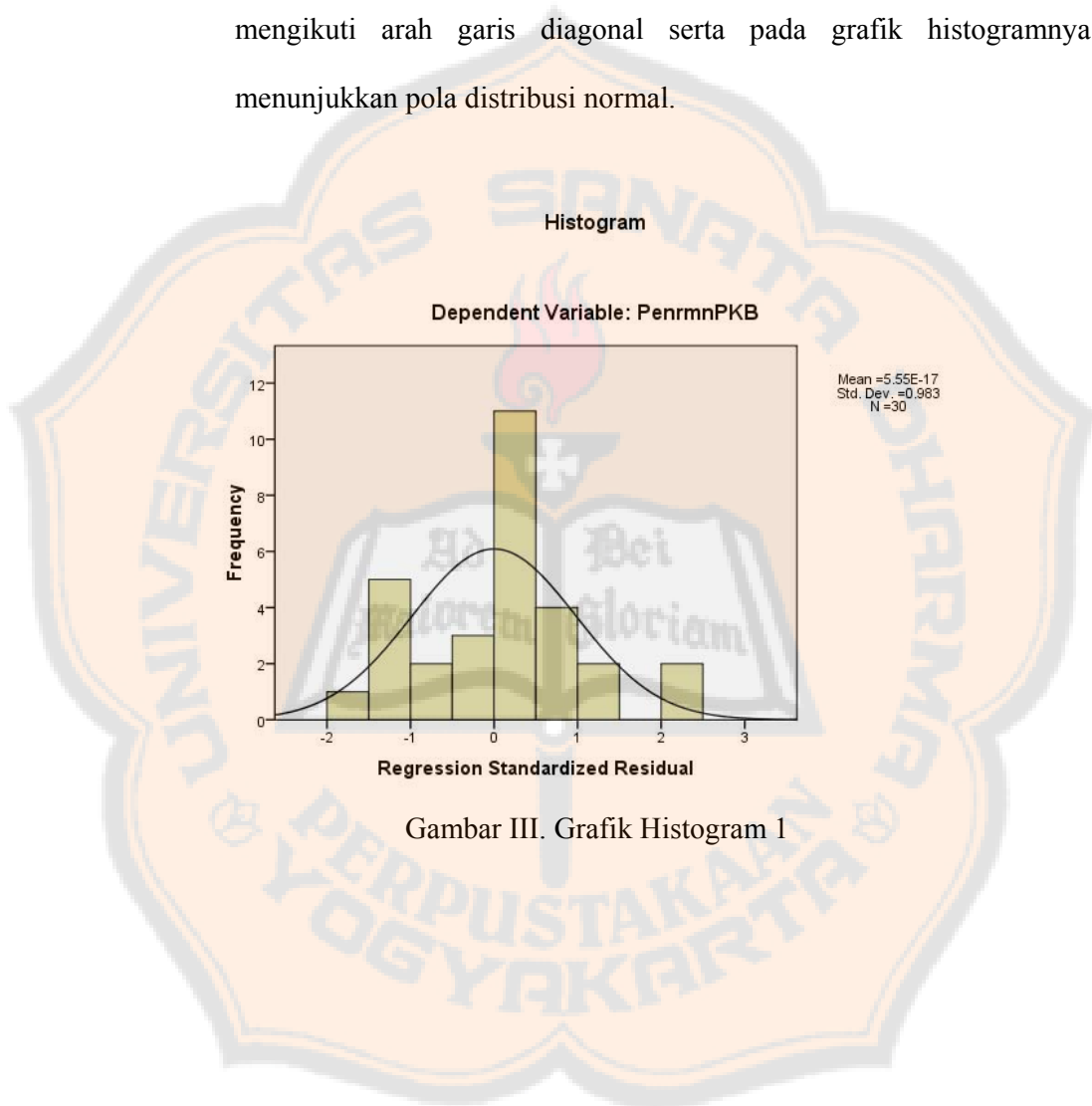
analisis regresi sederhana. Dalam hal ini, peneliti membutuhkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat (dependen). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini, sebagai variabel independen adalah jumlah kendaraan bermotor dan sebagai variabel dependen adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan untuk mencari suatu pengaruh dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Peneliti membutuhkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dalam hal ini, sebagai variabel independen adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan sebagai variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah.

1. Untuk menjawab permasalahan yang pertama yaitu mengenai adakah pengaruh dari jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan beberapa langkah, sebagai berikut :

- a. Uji Normalitas Data

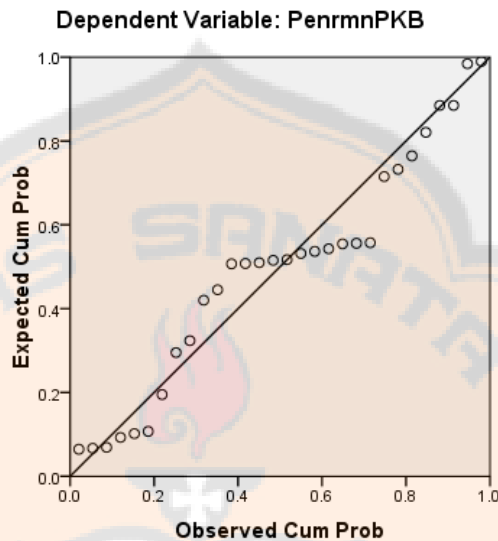
Hasil uji normalitas yang telah dilakukan dengan bantuan SPSS antara variabel independen dan variabel dependen menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak menceng ke kanan atau ke kiri.

menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi memenuhi asumsi normalitas karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal serta pada grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal.



Gambar III. Grafik Histogram 1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar IV. Grafik Normal Plots 1

b. Menentukan persamaan regresi sederhana

Untuk mengetahui pengaruh dari jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor digunakan persamaan regresi sederhana. Dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistik Program For Social Science*) 16 for windows dalam menentukan persamaan regresinya. Dari hasil olahan SPSS diketahui bahwa persamaan regresi sederhana adalah:

$$Y' = -7,895E9 + 262906,731 X$$

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dilakukan pengujian dengan uji t. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a) Menentukan formulasi hipotesa

$H_0 : b = 0$, berarti jumlah kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

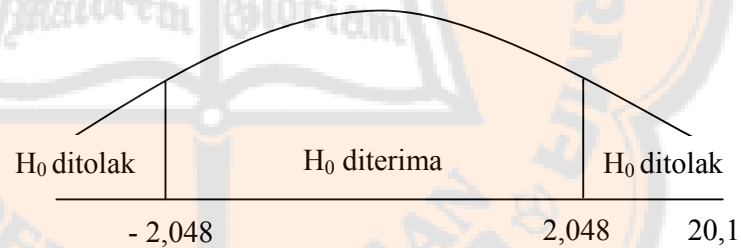
$H_1 : b \neq 0$, berarti jumlah kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

b) Menentukan tingkat signifikansi (α) = 5% (0,05) dan t_{hitung}

Maka $t_{tabel}(0,05/2 ; 30-2) = 2,048$

$t_{hitung} = 20,1$

c) Menentukan daerah keputusan



Gambar V. Daerah penolakan variabel jumlah kendaraan bermotor.

Keputusan yang diambil :

H_0 : diterima, $-2,048 \leq t_{hit} \leq 2,048$

H_0 : ditolak, $t_{hit} > 2,048$ atau $t_{hit} < - 2,048$

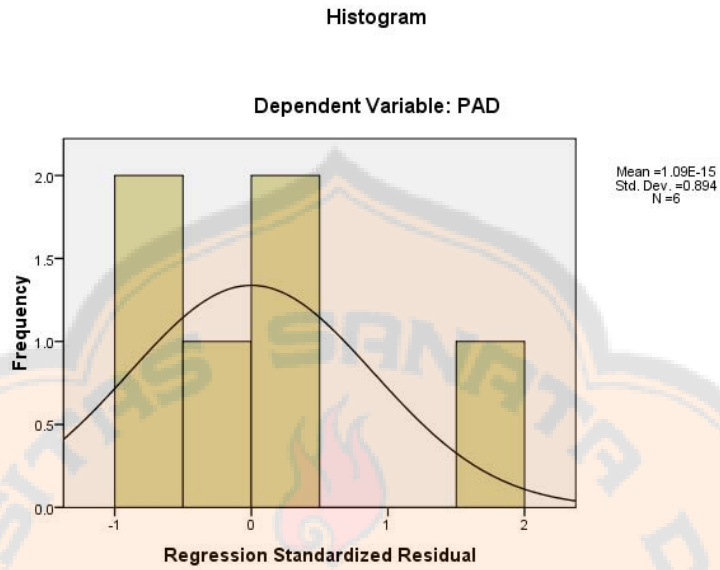
d) Menarik kesimpulan

Karena $t_{hitung} = 20,1 > t_{tabel} = 2,048$, maka H_0 ditolak. Dengan demikian, jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu mengenai adakah pengaruh dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan beberapa langkah, sebagai berikut :

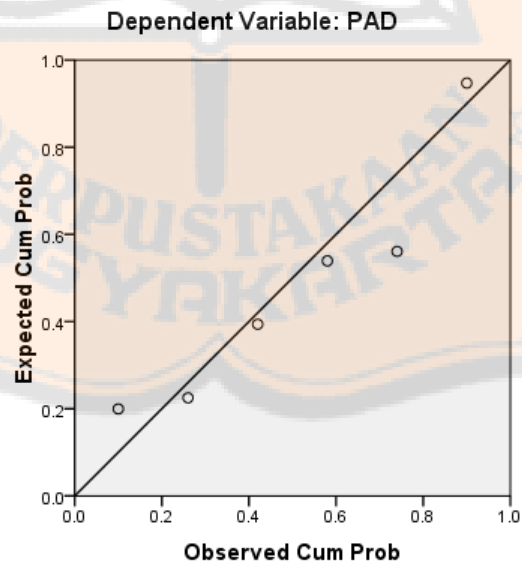
a. Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas yang telah dilakukan dengan bantuan SPSS antara variabel independen dan variabel dependen menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan residual terdistribusi secara tidak normal dan berbentuk menceng ke kiri. Sedangkan pada grafik normal probability plots terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi memenuhi asumsi normalitas karena data menyebar disekitar garis diagonal meskipun pada grafik histogram berbentuk menceng ke kiri karena metode yang lebih handal dalam menentukan normalitas suatu data adalah yang disajikan oleh grafik normal probability plots.



Gambar VI. Grafik Histogram 2

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar VII. Grafik Normal Plots 2

b. Menentukan persamaan regresi sederhana

Untuk mengetahui pengaruh dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan persamaan regresi sederhana. Dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistik Program For Social Science*) 16 for windows dalam menentukan persamaan regresinya. Dari hasil olahan SPSS diketahui bahwa persamaan regresi sederhana adalah:

$$Y' = -2.755E10 + 2.811 X$$

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dilakukan pengujian dengan uji t. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a) Menentukan formulasi hipotesa

$H_0 : b = 0$, berarti penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

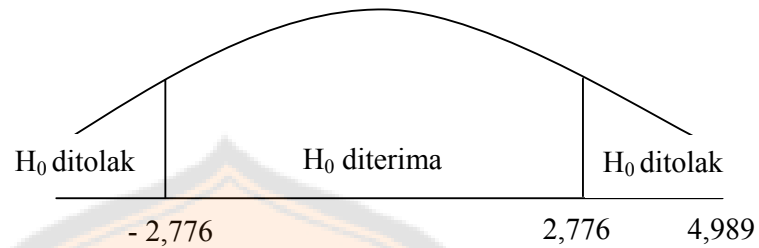
$H_2 : b \neq 0$, berarti penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b) Menentukan tingkat signifikansi (α) = 5% (0,05) dan t_{hitung}

Maka $t_{tabel}(0,05/2 ; 6-2) = 2,776$

$t_{hitung} = 4,989$

c) Menentukan daerah keputusan



Gambar VIII. Daerah penolakan variabel penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Keputusan yang diambil :

H_0 : diterima, $- 2,776 \leq t_{hit} \leq 2,776$

H_0 : ditolak, $t_{hit} > 2,776$ atau $t_{hit} < - 2,776$

d) Menarik kesimpulan

Karena $t_{hitung} = 4,989 > t_{tabel} = 2,776$, maka H_0 ditolak. Dengan demikian, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. Pembahasan

Dalam menganalisis, penulis menggunakan analisa regresi sederhana. Setelah menganalisis dan mengolah data dengan bantuan SPSS, berikut ini akan dibahas mengenai hasil analisis di atas.

1. Hipotesis pertama yaitu mengenai “adakah pengaruh dari jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Berdasarkan analisis data pada *Model Summary*, untuk mengukur sumbangan dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (*R Square*). Hasil olahan data menunjukkan *R Square* sebesar 0,935 yang berarti bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dijelaskan oleh variabel independen yaitu jumlah kendaraan bermotor sebesar 93,5% sedangkan 6,5% dipengaruhi oleh faktor lain selain jumlah kendaraan bermotor yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti tingkat kesadaran untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor, jumlah tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor memberikan sumbangan terbesar pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan kata lain, jika jumlah kendaraan bermotor naik maka akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan analisis data pada *Coefficients* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -7,895E9 + 262906,731 X$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

X = Jumlah kendaraan bermotor

Angka -7,895E9 merupakan nilai konstanta (a) yang menunjukkan bahwa jika tidak ada jumlah kendaraan bermotor maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan berkurang sebesar Rp7.895E9. Sedangkan

angka 262906,731 merupakan koefisien regresi (b) yang menunjukkan bahwa setiap adanya penambahan 1 kendaraan bermotor, maka akan ada kenaikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 262906,731. Hal ini berarti bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam pengambilan keputusan dapat membandingkan antara t_{hitung} sebesar 20,1 dengan t_{tabel} sebesar 2,048 yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Apabila jumlah kendaraan bermotor meningkat maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga akan meningkat. Meningkatnya Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Daerah yang kemudian akan menambah pos transfer atau penerimaan dari propinsi kepada setiap kabupaten dan kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pengembangan setiap kabupaten dan kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Hipotesis kedua yaitu mengenai “adakah pengaruh dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Berdasarkan analisis data pada *Model Summary*, untuk mengukur sumbangan dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (*R Square*). Hasil olahan

data menunjukkan *R Square* sebesar 0,862 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah dijelaskan oleh variabel independen yaitu penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 86,2% sedangkan 13,8% dipengaruhi oleh faktor lain selain penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan sumbangan terbesar pada Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, jika penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor naik maka akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan analisis data pada *Coefficients* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{\square} = -2.755E10 + 2.811 X$$

Keterangan:

Y_{\square} = Pendapatan Asli Daerah

X = Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Angka -2.755E10 merupakan nilai konstanta (a) yang menunjukkan bahwa jika tidak ada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor maka Pendapatan Asli Daerah akan berkurang sebesar Rp2.755E10. Sedangkan angka 2.811 merupakan koefisien regresi (b) yang menunjukkan bahwa setiap adanya penambahan Rp1 untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, maka akan ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.811. Hal ini

berarti bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam pengambilan keputusan dapat membandingkan antara t_{hitung} sebesar 4,989 dengan t_{tabel} sebesar 2,776 yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat mendorong meningkatnya pendapatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan meningkatnya pendapatan diharapkan seluruh kegiatan pembangunan dan pengembangan propinsi termasuk daerah kabupaten dan kota dapat dilaksanakan dengan maksimal. Selain itu, dengan meningkatnya pendapatan propinsi diharapkan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 20,1 yang lebih besar daripada nilai t_{tabel} sebesar 2,048.
2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,989 yang lebih besar daripada nilai t_{tabel} sebesar 2,776.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dihadapi Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang diberikan oleh bagian yang satu dengan yang lain kadang ada perbedaan sehingga harus klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan.

2. Ketersediaan data yang hanya 6 tahun tidak memungkinkan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel komponen Pendapatan Asli Daerah yang lain terhadap Pendapatan Asli Daerah

C. Saran

Berdasarkan analisis data, pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan periode tahun yang lebih lama lagi supaya hasil penelitian menjadi lebih akurat.
2. Sebaiknya menambah variabel penelitian yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah supaya bisa lebih mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel yang lain seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau pajak daerah lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 1997. *Analisis Regresi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Basuki, Sulistyو. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Final Daeng, Mohamad. 2010. *Horeee... DIY Bebas Bea Balik Nama*. Kompas.com <http://m.kompas.com/news/read/data/2010.05.26.19172836>. Diakses tanggal 9 Maret 2011.
- http://pemda-diy.go.id/berita/mod.php?mod=userpage&page_id=10. Diakses tanggal 18 November 2010.
- Purnandika, Handaru. 2005. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi S1*, tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2002. *Pajak Daerah*.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus (buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- RWN . 2010. *Pajak Progresif Tidak Efektif*. Kompas.com <http://perempuan.kompas.com/read/xml/2010/08/12/10445948/pajak.progresif.tidak.efektif>. Diakses tanggal 8 Maret 2011.
- Samudra, Azhari A. 1950. *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Singgih. 2010. *Statistik Parametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito
- Suharyadi, Purwanto S.K. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat (PT. Salemba Emban Patria).

- Tri, Cornelius Yudiyanto. 2007. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Tunggakan Pajak dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi S1*, tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.
- Trihendradi, Cornelius. 2009. *Step by Step SPSS Analisis Data Statistik*. Yogyakarta: ANDI.
- _____. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah.
- _____. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
- _____. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 35 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LAMPIRAN





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/2036/VI/2011

Membaca Surat : Dekan fak Ekonomi USD - Yogyakarta Nomor : 31/Kaprodil/Ajt/795/III/2011
 Tanggal Surat : 14 MARET 2011. Perihal : Ijin Penelitian
 Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : ALBERTUS ERWIN YUWANTO NIP/NIM : 072114047
 Alamat : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta
 Judul : PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH.
 Lokasi : Prov DIY.
 Waktu : 3 (Tiga) Bulan Mulai tanggal : 17 Maret s/d 17 Juni 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 17 Maret 2011

An. Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan.
3. Dinas DPPKA Prov DIY.
4. Yang bersangkutan.



Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	JumlhKBM ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PenrnmPKB

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.967 ^a	.935	.933	8.05309E9

a. Predictors: (Constant), JumlhKBM

b. Dependent Variable: PenrnmPKB

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.620E22	1	2.620E22	403.992	.000 ^a
	Residual	1.816E21	28	6.485E19		
	Total	2.802E22	29			

a. Predictors: (Constant), JumlhKBM

b. Dependent Variable: PenrnmPKB

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.895E9	2.916E9		-2.708	.011
	JumlhKBM	262906.731	13080.231	.967	20.100	.000

a. Dependent Variable: PenrnmPKB

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PnrmanPKB ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PAD

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.928 ^a	.862	.827	6.35679E10

a. Predictors: (Constant), PnrmanPKB

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.006E23	1	1.006E23	24.893	.008 ^a
	Residual	1.616E22	4	4.041E21		
	Total	1.168E23	5			

a. Predictors: (Constant), PnrmanPKB

b. Dependent Variable: PAD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.755E10	1.231E11		-.224	.834
	PnrmanPKB	2.811	.563	.928	4.989	.008

a. Dependent Variable: PAD

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2005

URAIAN	TARGET 2005	REALISASI 2005
PENDAPATAN	667.355.875.425,40	699.579.306.215,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH	375.879.788.111,36	401.912.337.894,18
Pajak Daerah	338.866.932.998,36	360.119.663.754,00
Pajak Kendaraan Bermotor	130.059.012.000,00	149.291.828.905,00
- Yogyakarta	40.856.619.000,00	45.044.171.805,00
- Bantul	23.393.223.000,00	27.587.244.650,00
- Kulon Progo	6.332.417.000,00	7.698.799.600,00
- Gunung Kidul	7.315.010.000,00	8.878.048.650,00
- Sleman	52.161.743.000,00	60.083.564.200,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	164.757.718.700,00	154.710.634.950,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.850.202.298,00	53.914.945.004,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT	2.200.000.000,00	2.202.254.895,00
Retribusi Daerah	12.010.026.408,00	11.940.416.429,00
Hasil Perusahaan Milik Daerah	12.358.409.005,00	11.859.586.426,07
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.644.419.700,00	17.992.671.285,11
DANA PERIMBANGAN	271.047.087.314,04	277.237.968.321,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	20.429.000.000,00	20.429.000.000,00

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2006

URAIAN	TARGET 2006	REALISASI 2006
PENDAPATAN	811.602.007.151,72	881.163.411.105,92
PENDAPATAN ASLI DAERAH	368.522.643.044,43	436.500.656.107,92
Pajak Daerah	327.375.549.000,00	374.578.524.388,00
Pajak Kendaraan Bermotor	138.123.360.000,00	171.146.972.390,00
- Yogyakarta	43.308.016.000,00	49.856.504.690,00
- Bantul	24.796.816.000,00	31.670.891.200,00
- Kulon Progo	6.712.362.000,00	9.046.205.150,00
- Gunung Kidul	7.753.910.000,00	10.664.295.850,00
- Sleman	55.552.256.000,00	69.909.075.500,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	103.867.319.000,00	115.544.048.150,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	83.678.870.000,00	85.805.843.818,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT	1.706.000.000,00	2.081.660.030,00
Retribusi Daerah	11.745.727.282,00	12.457.544.866,00
Hasil Perusahaan Milik Daerah	12.299.634.962,43	11.217.078.313,10
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17.101.731.800	38.247.508.540,82
DANA PERIMBANGAN	441.562.452.507,29	442.882.531.848,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.516.911.600,00	1.780.223.150,00

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2007

URAIAN	TARGET 2007	REALISASI 2007
PENDAPATAN	911.558.526.278,00	976.550.078.462,97
PENDAPATAN ASLI DAERAH	420.568.426.068,00	480.181.759.199,50
Pajak Daerah	378.916.438.850,00	434.898.894.141,00
Pajak Kendaraan Bermotor	171.324.990.700,00	199.659.041.270,00
- Yogyakarta	50.035.167.000,00	56.348.806.670,00
- Bantul	31.670.247.200,00	38.427.445.100,00
- Kulon Progo	9.046.205.150,00	10.697.227.850,00
- Gunung Kidul	10.664.295.850,00	12.814.200.000,00
- Sleman	69.909.075.500,00	81.371.361.650,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	115.544.692.150,00	142.987.677.700,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	90.046.756.000,00	89.940.087.066,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT	2.000.000.000,00	2.312.088.105,00
Retribusi Daerah	14.722.357.478,00	15.563.425.637,00
Hasil Perusahaan Milik Daerah	12.371.829.740,00	11.927.611.593,02
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Ya	14.557.800.000,00	15.791.827.828,48
DANA PERIMBANGAN	488.667.515.010,00	489.602.165.857,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.322.585.200,00	6.766.153.416,47

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2008

URAIAN	TARGET 2008	REALISASI 2008
PENDAPATAN	1.161.986.630.223,42	1.325.463.828.353,74
PENDAPATAN ASLI DAERAH	547.887.175.315,00	699.726.193.600,48
Pajak Daerah	486.168.175.841,00	525.186.561.693,35
Pajak Kendaraan Bermotor	208.414.628.000,00	222.137.597.800,00
- Yogyakarta	58.180.318.000,00	60.989.479.500,00
- Bantul	40.276.541.000,00	43.055.170.300,00
- Kulon Progo	11.304.970.000,00	12.282.400.850,00
- Gunung Kidul	13.765.577.000,00	14.946.510.350,00
- Sleman	84.887.222.000,00	90.864.036.800,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	169.530.376.000,00	190.932.195.150,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	106.023.171.841,00	109.829.732.718,35
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT	2.200.000.000,00	2.287.036.025,00
Retribusi Daerah	33.144.872.640,00	29.259.898.275,50
Hasil Perusahaan Milik Daerah	12.768.526.834,00	12.481.050.738,67
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15.805.600.000,00	132.798.682.892,96
DANA PERIMBANGAN	590.574.676.643,42	601.802.167.488,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	23.524.778.265,00	23.935.467.265,26

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2009

URAIAN	TARGET 2009	REALISASI 2009
PENDAPATAN	1.213.220.909.526,00	1.291.481.403.787,94
PENDAPATAN ASLI DAERAH	575.516.509.511,00	650.559.469.694,35
Pajak Daerah	494.847.565.500,00	541.192.265.769,60
Pajak Kendaraan Bermotor	232.505.419.000,00	258.278.414.295,00
- Yogyakarta	62.489.677.000,00	68.889.389.345,00
- Bantul	45.531.060.000,00	50.496.938.050,00
- Kulon Progo	12.676.258.000,00	14.513.759.400,00
- Gunung Kidul	15.411.991.000,00	17.592.657.700,00
- Sleman	96.396.433.000,00	106.785.669.800,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	159.698.700.000,00	176.511.931.800,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	100.253.869.000,00	104.090.628.453,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT	2.389.577.500,00	2.311.291.271,60
Retribusi Daerah	32.591.963.785,00	34.785.228.180,57
Hasil Perusahaan Milik Daerah	19.736.868.047,00	20.094.713.175,83
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	28.340.112.179,00	54.487.262.568,35
DANA PERIMBANGAN	630.650.143.805,00	631.011.121.383,59
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.054.256.210,00	9.910.812.710,00

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2010

URAIAN	TARGET 2010	REALISASI 2010
PENDAPATAN	1.275.220.502.557,65	1.403.174.023.247,19
PENDAPATAN ASLI DAERAH	638.881.411.884,65	768.341.053.125,19
Pajak Daerah	539.653.461.500,00	634.710.019.946,80
Pajak Kendaraan Bermotor	260.489.549.000,00	280.867.269.350,00
- Yogyakarta	68.765.892.000,00	72.204.809.050,00
- Bantul	52.253.913.000,00	55.864.713.000,00
- Kulon Progo	14.700.523.000,00	16.355.890.550,00
- Gunung Kidul	17.453.072.000,00	19.475.416.350,00
- Sleman	107.316.149.000,00	116.966.440.400,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	175.972.454.000,00	241.213.887.400,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	100.801.881.000,00	110.083.609.715,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT	2.389.577.500,00	2.545.253.481,80
Retribusi Daerah	31.556.968.029,00	32.836.503.243,89
Hasil Perusahaan Milik Daerah	26.953.742.568,65	26.333.869.884,77
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	40.717.239.787,00	74.460.660.049,73
DANA PERIMBANGAN	627.947.119.673,00	626.677.339.122,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.391.971.000,00	8.155.631.000,00

**JUMAH KENDARAAN BERMOTOR
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2005**

No	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	JUMLAH KENDARAAN BERMOTR					
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN/KOTA					
		YOGYAKARTA	BANTUL	KULONPROGO	GUNUNGKIDUL	SLEMAN	JUMLAH
1	Sedan Staion (Bukan Umum)	7.906	2.537	321	300	8.255	19.319
2	Sedan Staion (Umum)	548	75	-	-	175	798
3	Jeep (Bukan Umum)	3.287	1.271	247	152	3.522	8.479
4	Jeep (Umum)	-	502	-	161	-	663
5	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Bukan Umum)	15.027	5.876	1.709	1.998	17.381	41.991
6	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Umum)	17	79	96	152	223	566
7	Bus, Micro Bus (Bukan Umum)	323	110	36	31	190	684
8	Bus, Micro Bus (Umum)	1.157	420	331	485	886	3.279
9	Pick Up, Box (Bukan Umum)	4.738	3.511	1.115	1.604	6.601	17.569
10	Pick Up, Box (Umum)	152	1	-	14	-	167
11	Truck (Bukan Umum)	1.810	1.788	780	1.037	2.544	7.959
12	Truck (Umum)	62	25	32	17	65	201
13	Sepeda Motor	148.938	164.704	50.339	55.038	265.213	684.232
JUMLAH		183.965	180.899	55.006	60.989	305.055	785.914

**JUMAH KENDARAAN BERMOTOR
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2006**

No	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	JUMLAH KENDARAAN BERMOTR					
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN/KOTA					
		YOGYAKARTA	BANTUL	KULONPROGO	GUNUNGKIDUL	SLEMAN	JUMLAH
1	Sedan Staion (Bukan Umum)	8912	3068	402	407	9840	22629
2	Sedan Staion (Umum)	510	75	-	-	170	755
3	Jeep (Bukan Umum)	3455	1419	285	178	3881	9218
4	Jeep (Umum)	-	-	-	-	-	-
5	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Bukan Umum)	16450	7086	1988	2508	19649	47681
6	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Umum)	2	50	94	152	214	512
7	Bus, Micro Bus (Bukan Umum)	275	68	35	32	194	604
8	Bus, Micro Bus (Umum)	758	483	283	476	833	2833
9	Pick Up, Box (Bukan Umum)	5289	3691	1201	1714	6900	18795
10	Pick Up, Box (Umum)	-	1	-	13	-	14
11	Truck (Bukan Umum)	1889	1936	824	1196	2632	8477
12	Truck (Umum)	47	15	34	12	41	149
13	Sepeda Motor	163106	178038	56863	63318	290532	751857
JUMLAH		200693	195930	62009	70006	334886	863524

**JUMAH KENDARAAN BERMOTOR
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2007**

No	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	JUMLAH KENDARAAN BERMOTR					
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN/KOTA					
		YOGYAKARTA	BANTUL	KULONPROGO	GUNUNGKIDUL	SLEMAN	JUMLAH
1	Sedan Staion (Bukan Umum)	8649	2949	417	450	9994	22459
2	Sedan Staion (Umum)	497	75	-	-	170	742
3	Jeep (Bukan Umum)	3379	1437	278	180	3951	9225
4	Jeep (Umum)	-	-	-	-	-	-
5	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Bukan Umum)	16924	7591	2092	2658	20956	50221
6	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Umum)	1	49	87	149	195	481
7	Bus, Micro Bus (Bukan Umum)	277	89	36	35	195	632
8	Bus, Micro Bus (Umum)	683	458	284	467	815	2707
9	Pick Up, Box (Bukan Umum)	5056	3817	1241	1751	6777	18642
10	Pick Up, Box (Umum)	-	-	-	12	-	12
11	Truck (Bukan Umum)	1804	2060	809	1256	2637	8566
12	Truck (Umum)	46	11	571	11	39	707
13	Sepeda Motor	170327	195703	60681	70510	310289	807510
JUMLAH		207643	214239	66525	77479	356018	921904

**JUMAH KENDARAAN BERMOTOR
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2008**

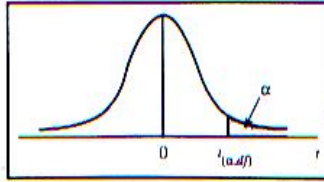
No	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	JUMLAH KENDARAAN BERMOTR					
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN/KOTA					
		YOGYAKARTA	BANTUL	KULONPROGO	GUNUNGKIDUL	SLEMAN	JUMLAH
1	Sedan Staion (Bukan Umum)	9387	3537	489	541	10927	24881
2	Sedan Staion (Umum)	420	125	-	-	213	762
3	Jeep (Bukan Umum)	3617	1646	298	223	4169	9953
4	Jeep (Umum)	-	-	-	-	-	-
5	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Bukan Umum)	19604	8794	2374	3143	24035	57950
6	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Umum)	4	37	71	146	168	426
7	Bus, Micro Bus (Bukan Umum)	283	76	36	39	225	659
8	Bus, Micro Bus (Umum)	687	391	258	503	797	2636
9	Pick Up, Box (Bukan Umum)	5657	4331	1383	2036	7034	20441
10	Pick Up, Box (Umum)	-	1	-	12	-	13
11	Truck (Bukan Umum)	2054	2158	890	1496	2722	9484
12	Truck (Umum)	45	30	57	18	85	236
13	Sepeda Motor	198183	213235	70146	82968	331454	859986
JUMLAH		239941	234361	76002	91125	381829	1023258

**JUMAH KENDARAAN BERMOTOR
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2009**

No	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	JUMLAH KENDARAAN BERMOTR					
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN/KOTA					
		YOGYAKARTA	BANTUL	KULONPROGO	GUNUNGKIDUL	SLEMAN	JUMLAH
1	Sedan Staion (Bukan Umum)	9065	3729	550	590	11409	25343
2	Sedan Staion (Umum)	495	101	-	-	200	796
3	Jeep (Bukan Umum)	3371	1702	310	240	4258	9881
4	Jeep (Umum)	-	111	-	-	-	111
5	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Bukan Umum)	19754	9692	2599	3446	27255	62746
6	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Umum)	27	25	72	105	100	329
7	Bus, Micro Bus (Bukan Umum)	280	85	37	40	218	660
8	Bus, Micro Bus (Umum)	681	417	250	455	704	2507
9	Pick Up, Box (Bukan Umum)	5240	4304	1416	2052	6914	19926
10	Pick Up, Box (Umum)	-	8	-	11	1	20
11	Truck (Bukan Umum)	1949	2085	888	1435	2730	9265
12	Truck (Umum)	40	3343	87	17	149	3636
13	Sepeda Motor	185258	222824	74614	87392	354156	924244
JUMLAH		226160	248436	80823	95783	408094	1059296

**JUMAH KENDARAAN BERMOTOR
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2010**

No	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	JUMLAH KENDARAAN BERMOTR					
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN/KOTA					
		YOGYAKARTA	BANTUL	KULONPROGO	GUNUNGKIDUL	SLEMAN	JUMLAH
1	Sedan Staion (Bukan Umum)	8615	3734	647	661	11453	25110
2	Sedan Staion (Umum)	432	75	-	-	182	689
3	Jeep (Bukan Umum)	3219	1676	331	262	4292	9780
4	Jeep (Umum)	-	-	-	-	-	-
5	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Bukan Umum)	20817	10530	2957	3774	30242	68320
6	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Umum)	58	22	88	119	141	428
7	Bus, Micro Bus (Bukan Umum)	291	88	38	55	211	683
8	Bus, Micro Bus (Umum)	667	406	253	439	708	2473
9	Pick Up, Box (Bukan Umum)	5217	4387	1489	2099	7222	20424
10	Pick Up, Box (Umum)	-	2	-	13	7	32
11	Truck (Bukan Umum)	1880	2222	876	1499	2731	9208
12	Truck (Umum)	39	121	145	30	289	624
13	Sepeda Motor	192429	233270	82128	94619	380700	983146
JUMLAH		233664	256533	88952	103580	438178	1120907



TABEL 4

Distribusi t

DERAJAT Ke- BEBASAN	WILAYAH UJUNG ATAS					
	.25	.10	.05	.025	.01	.005
1	1.0000	3.0777	6.3138	12.7062	31.8207	63.6574
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.7649	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.7407	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.8041
5	0.7267	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0322
6	0.7176	1.4396	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.7111	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.7064	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.7027	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.6998	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.6974	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.6955	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0645
13	0.6938	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.6924	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.6912	1.3406	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467
16	0.6901	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.6892	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.6884	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.6876	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.6870	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453
21	0.6864	1.3232	1.7207	2.0796	2.5177	2.8314
22	0.6858	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188
23	0.6853	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073
24	0.6848	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969
25	0.6844	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874
26	0.6840	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787
27	0.6837	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707
28	0.6834	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633
29	0.6830	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564
30	0.6828	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500
31	0.6825	1.3095	1.6955	2.0395	2.4528	2.7440
32	0.6822	1.3086	1.6939	2.0369	2.4487	2.7385
33	0.6820	1.3077	1.6924	2.0345	2.4448	2.7333
34	0.6818	1.3070	1.6909	2.0322	2.4411	2.7284
35	0.6816	1.3062	1.6896	2.0301	2.4377	2.7238
36	0.6814	1.3055	1.6883	2.0281	2.4345	2.7195
37	0.6812	1.3049	1.6871	2.0262	2.4314	2.7154
38	0.6810	1.3042	1.6860	2.0244	2.4286	2.7116
39	0.6808	1.3036	1.6849	2.0227	2.4258	2.7079
40	0.6807	1.3031	1.6839	2.0211	2.4233	2.7045
41	0.6805	1.3025	1.6829	2.0195	2.4208	2.7012
42	0.6804	1.3020	1.6820	2.0181	2.4185	2.6981
43	0.6802	1.3016	1.6811	2.0167	2.4163	2.6951
44	0.6801	1.3011	1.6802	2.0154	2.4141	2.6923
45	0.6800	1.3006	1.6794	2.0141	2.4121	2.6896

(Bersambung)